

Abstrak

Aset lainnya merupakan aset yang terbilang kurang signifikan keberadaannya. Hal ini yang menyebabkan pencatatan akuntansi terhadap aset lainnya seringkali tidak diperhatikan. Sebagai entitas pemerintahan sudah selayaknya mengeluarkan laporan keuangan yang sesuai dan dapat diandalkan, maka tidak hanya aset tetap dan aset lancar yang penting untuk diperhatikan perlakuan akuntansinya. Aset lainnya juga perlu ditinjau terkait kesesuaiannya dalam melakukan identifikasi, klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penghentian dan pelepasan, serta penyajian dan pengungkapan. Kebijakan pencatatan atas aset lainnya perlu ditegaskan sebagai kewajiban pencatatan di entitas pemerintahan untuk menghindari banyak kesalahan dalam pelaporan keuangan pemerintah. Dalam penelitian ini, penulis bertujuan untuk meninjau kesesuaian penerapan akuntansi atas aset lainnya pada salah satu satuan kerja pemerintah pusat yaitu Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I. Selain itu, penulis juga bermaksud untuk menemukan berbagai hambatan dan masalah yang muncul pada penerapan akuntansi atas aset lainnya di Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I pada Tahun Anggaran 2021. Dalam penulisan karya tulis ini, penulis menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh secara langsung dari Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I. Metode pengumpulan data yang dilakukan meliputi studi pustaka, wawancara, dan observasi. Hal ini dilakukan agar hasil penelitian yang didapatkan akurat dan relevan. Peninjauan kesesuaian penerapan akuntansi atas aset lainnya berkaitan dengan penganggaran, pengakuan, pengukuran, pencatatan, serta penyajian dan pengungkapannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan penerapan akuntansi aset lainnya di Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I cukup sesuai dengan peraturan dan standar akuntansi yang berlaku. Pencatatan akuntansi yang telah menggunakan aplikasi SAKTI dapat memudahkan pegawai dan mengurangi kesalahan teknis. Namun, dalam penerapan akuntansinya masih ditemukan beberapa kendala dan hambatan, diantaranya tiap-tiap bidang tidak memberitahukan kebutuhannya di awal masa penganggaran apabila ingin melakukan pengadaan aset tak berwujud. Hal ini yang menyebabkan aset tak berwujud tidak dapat diakui sebagai aset lainnya, karena tidak dilakukan penganggaran ke belanja modal. Meskipun demikian, Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I telah melakukan cara alternatif untuk menyelesaikan kendala tersebut dan diharapkan tetap mempertahankan ketepatan dan kesesuaiannya dalam membuat laporan keuangan agar dapat diandalkan.

Kata kunci: Aset Lainnya, Entitas Pemerintahan, Satuan Kerja Pemerintah Pusat, Aset Tak Berwujud

Abstract

Other assets are assets that are considered less significant in existence. This causes the accounting records of other assets are often not considered. As a government entity, it is proper to issue appropriate and reliable financial reports, so it is not only fixed assets and current assets that are important to pay attention to accounting treatment. Other assets also need to be reviewed regarding their suitability for identification, classification, recognition, measurement, and disposal, as well as presentation and disclosure. The recording policy on other assets needs to be emphasized as a recording obligation in government entities to avoid many errors in government financial reporting. In this study, the authors aim to review the suitability of the application of accounting for other assets in one of the central government unit of work, namely Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I. In addition, the authors also intend to find various obstacles and problems that arise in the application of accounting for other assets at the Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I in Fiscal Year 2021. In writing this paper, the author uses primary and secondary data obtained directly from the Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I. The data collection methods include literature study, interviews, and observation. It is intending that the research results obtained are accurate and relevant. Reviewing the suitability of accounting for other assets related to budgeting, recognition, measurement, recording, and presentation and disclosure. The results showed that the overall application of accounting for other assets at the Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I was quite in accordance with applicable accounting regulations and standards. Accounting records that have used the SAKTI application can make it easier for employees and reduce technical errors. However, in the application of accounting, there are still several obstacles, including each sector not notifying their needs at the beginning of the budgeting period if they want to obtain intangible assets. This causes intangible assets to not be recognized as other assets, because capital expenditures are not budgeted for. Nevertheless, the Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I has taken alternative ways to resolve these obstacles and is expected to maintain its accuracy and suitability in making financial reports reliable.

Keywords: *Other Assets, Government Entities, Central Government Unit of Work, Intangible Assets*